

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia
TEMA : Penelitian Kasus TPA Cipayung
Sampah Rawan Jadi Konflik Politik
SURAT KABAR/MAJALAH : Monitor Depok

Hari Jumat Tanggal 4 Bulan Desember Tahun 2008 Halaman Kol 3 - 6

RINGKASAN

Dalam disertasi yang berjudul *Relasi-relasi kekuasaan antar pelaku-dalam pengelolaan sampah di Kota Depok* untuk mendapatkan gelar doktor dari Departemen Antropologi FISIP UI, Firkawin mengemukakan pengelolaan sampah dapat dilihat dari hubungan sosial masyarakat. Hubungan kekuasaan antarpelaku dapat bersifat produktif-melahirkan kebersihan tetapi juga dapat bersifat produktif-membuat kondisi persampahan tambah parah. Kenyataan ini disebabkan oleh aneka hubungan – hubungan kekuasaan antarpelaku yang cukup rumit dan simpang siur. Tidak stabil dan berubah – ubah, sesuai kepentingan masing – masing pihak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

CATATAN:

Penelitian kasus TPA Cipayung Sampah rawan jadi konflik politik

UNIVERSITAS INDONESIA, MONDE

Dalam hubungan sosial masyarakat di lapangan pengelolaan sampah, dimana kekuasaan dijawantahkan oleh masing-masing pelaku, sebagaimana terungkap bahwa hubungan kekuasaan antarpelaku dapat bersifat produktif-melahirkan kebersihan tetapi juga dapat bersifat destruktif-membuat kondisi persampahan bertambah parah. Kenyataan ini disebabkan oleh aneka hubungan-hubungan kekuasaan antarpelaku yang cukup rumit dan simpang siur. Tidak stabil dan berubah-ubah, sesuai kepentingan masing-masing pihak atau pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Demikian dikemukakan Firkawin dalam disertasinya

berjudul *Relasi-relasi kekuasaan antara pelaku-dalam pengelolaan sampah di Kota Depok*, untuk mendapatkan gelar doktor dari Departement Antropologi FISIP UI, kemarin.

“Penelitian ini dilakukan di Depok karena sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang pernah mengalami pergulatan keras melawan sampah dan kemudian mendapat predikat sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2005.” ujarnya.

Pengelolaan sampah di Kota Depok, kata dia, telah menciptakan hubungan kekuasaan di antara beberapa instansi atau dinas di dalam lingkungan pemerintahan.

Terbukti tidak semua orang atau pihak mampu mengelola

sampah biarpun fasilitas dan peralatan telah diberikan. Perlu diketahui saat TPA Cipayung direhabilitasi, warga sekitar jalanan yang dilalui berkali-kali melakukan aksi penutupan jalan.

Warga berkuasa

Warga sekitar sepertinya sangat berdaya, berkuasa dan punya posisi tawar cukup kuat dalam soal mengatur pemakaian ruas jalan perlintasan menuju Cipayung. Sementara di lain pihak para pemulung bersikap memberi dukungan bagi kelangsungan TPA Cipayung.

Alhasil, sambungnya, tak dapat dihindari kehadiran TPA Cipayung saat itu telah menimbulkan polarisasi atau keretakan sosial di masyarakat komunitas Cipayung.

“Walikota terpilih Nur Mahmudi Ismail, meluncurkan konsep baru di bidang persampahan, bernama Sipesat. Para politisi tidak peduli apakah dengan program Sipesat efektif mengatasi masalah sampah Depok atau tidak.”

Saat itu, kata dia, yang diurus oleh politisi di DPRD bahwa Walikota berpotensi melanggar hukum karena mengeluarkan dana APBD sebesar Rp211 juta untuk mendanai Sipesat tanpa melalui proses lelang serta pemasangan balih beris iklan Sipesat dan gambar Walikota yang dananya diberikan oleh seorang pengusaha tetapi mengatasmakan infokom Kota Depok. “Sejak itu tuntutan merelokasi TPA Cipayung-pun mereda,” demikian Firkawin.(wen)